

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Thoha (2008) menyebutkan konteks administrasi publik saat ini bukan lagi hanya sekedar instrumen birokrasi negara, namun fungsinya lebih dari itu administrasi publik sebagai instrumen kolektif, sebagai sarana publik untuk menyelenggarakan tata kelola kepentingan bersama dalam mencapai tujuan-tujuan publik yang telah disepakati. Pergeseran ini menandai, administrasi publik telah memasuki wilayah peran publik yang lebih substantif. Wilayah administrasi publik demikian ini oleh Frederickson (1997) disebut administrasi publik sebagai *governance*.

Sejalan dengan perkembangan administrasi publik yang diarahkan kepada memberikan manfaat untuk publik atau orang banyak, maka di perlukannya tata pemerintahan (*governance*). Paradigma baru ini menekan agar pemerintah dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Istilah *Governance* merupakan sebuah teori baru dalam administrasi Publik (Frederickson, 1997).

Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi pendorong terciptanya lingkungan yang dapat memfasilitasi

pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri (Sumarto, 2003)

Dynamic governance merupakan sistem tata kelola pemerintahan yang diterapkan oleh pemerintah Negara Singapura yang mampu membawa mereka menuju pada sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. Sebagaimana tujuan pelayanan publik yang ingin dicapai oleh reformasi birokrasi Indonesia, maka konsep *dynamic governance* menjadi acuan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, termasuk pada permasalahan lingkungan hidup.

Jika melihat kondisi negara-negara di dunia, tantangan yang kemudian akan dihadapi oleh pemerintah kota dan masyarakatnya terkait dengan permasalahan lingkungan hidup yaitu terkait sampah. Terutama di kota-kota besar, sampah telah menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat berakibat pada kebersihan lingkungan, menimbulkan bau dan mengakibatkan munculnya berbagai penyakit. Oleh karena itu, pengelolaan sampah telah menjadi isu yang penting disamping masalah lingkungan lainnya, terutama untuk kota-kota padat penduduk di negara-negara berkembang (Addahlawi et al., 2020).

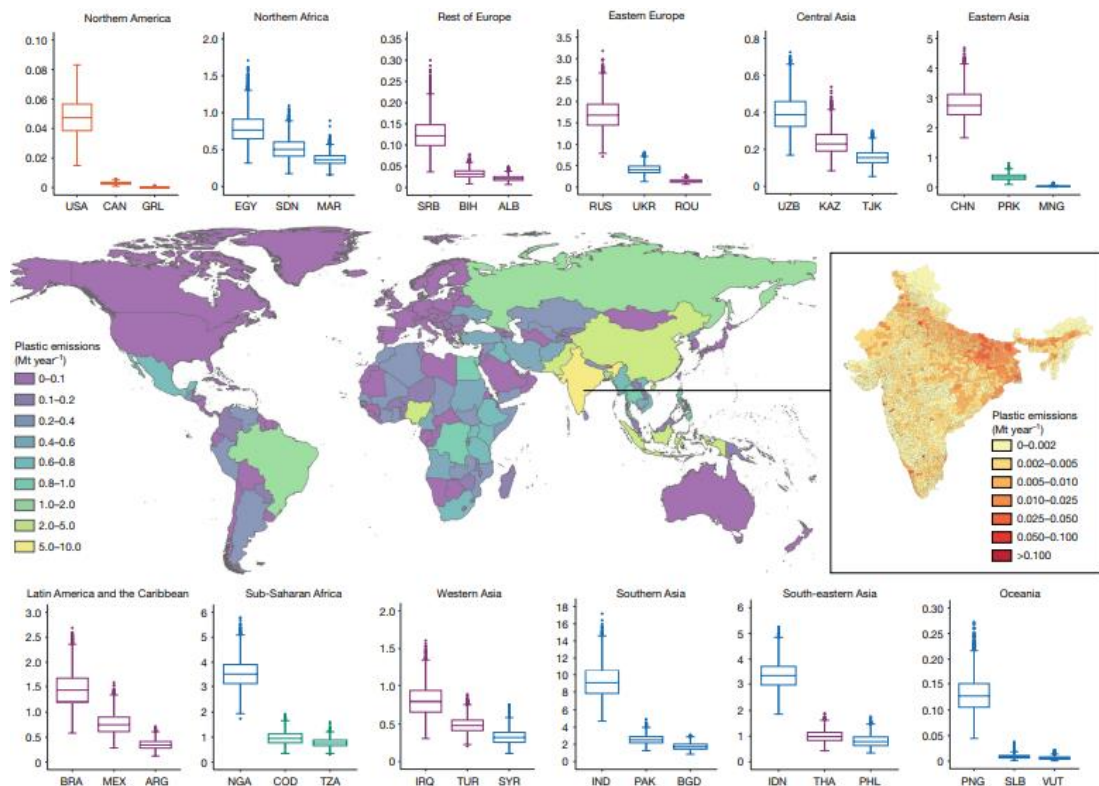
Dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang

berbentuk padat. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah. Sampah tersebut berupa sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik.

Terdapat beberapa negara penyumbang sampah terbanyak di dunia, dan Indonesia menjadi salah satu negara produsen sampah terbanyak khususnya sampah plastik tiap tahunnya, Dilansir dari media online yaitu Voi.id (2022) menyebutkan bahwa menurut data dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton/tahun, dan sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut (Jambeck et al., 2015). Indonesia masuk urutan kedua penyumbang sampah plastik sejagat pada tahun 2019 dengan 3,21 Juta metrik ton/tahun, sedangkan di urutan pertama yaitu China dengan 8,81 juta metrik ton/tahun.

Data terbaru sebuah studi Cottom et al., (2024) dari University of Leeds menempatkan Indonesia sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar ketiga di dunia, menghasilkan 3,4 juta ton sampah plastik. Penelitian ini menggunakan AI untuk memetakan pengelolaan sampah di lebih dari 50.000 kota. Data menunjukkan sebagian besar polusi plastik berasal dari sampah yang tidak diangkut, yang mencapai lebih dari dua pertiga dari total polusi plastik global.

Emisi polusi plastik tertinggi secara absolut terjadi di Asia Selatan, Afrika Sub-Sahara, dan Asia Tenggara. India menjadi penyumbang terbesar dengan 9,3 juta ton per tahun (hampir 20% emisi plastik global), diikuti oleh Nigeria (3,5 juta ton), Indonesia (3,4 juta ton), dan Tiongkok (2,8 juta ton). Peringkat Tiongkok lebih rendah dibandingkan studi sebelumnya, mencerminkan penggunaan data yang lebih mutakhir yang menunjukkan kemajuan substansial dalam mengadopsi insinerasi limbah dan tempat pembuangan sampah terkendali (Cottom et al., 2024).



Gambar I.1. Emisi makroplastik ke lingkungan (puing-puing dan plastik yang dibakar terbuka)

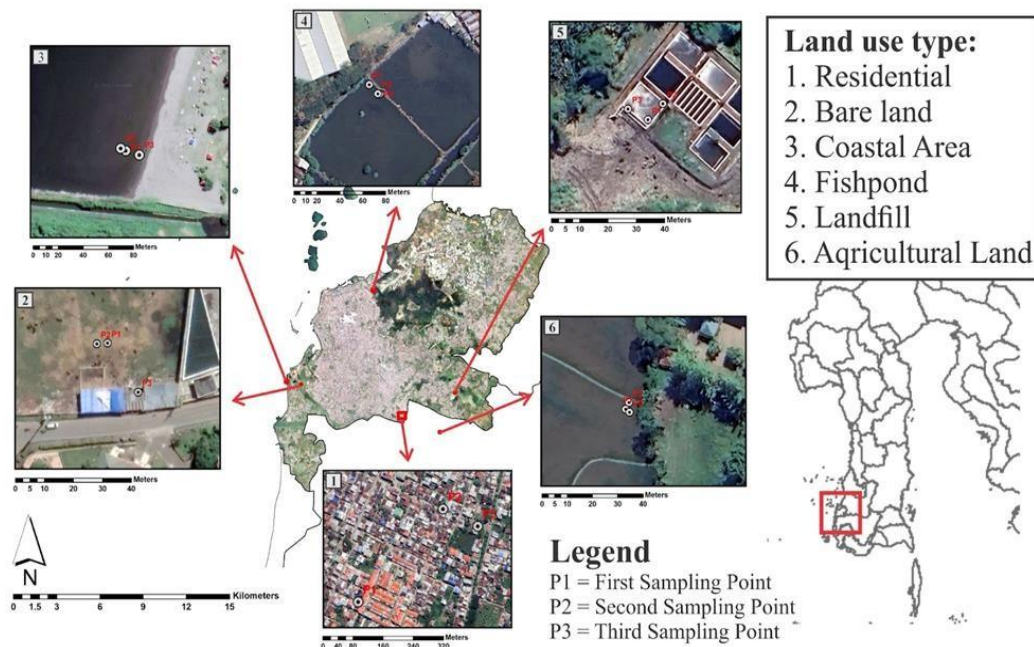
Sumber: Cottom et al., (2024)

Data di atas memperkuat fakta bahwa Indonesia tetap menjadi salah satu penyumbang utama polusi plastik dunia. Meskipun beberapa laporan menunjukkan penurunan peringkat ke posisi kelima pada tahun-tahun berikutnya, studi ini menyoroti tantangan mendasar yang dihadapi negara seperti Indonesia: kurangnya akses universal ke layanan pengelolaan sampah yang efektif.

Riset terbaru Walenna et al., (2024), yang dilakukan di Kota Makassar pada bulan Mei-Juni 2023, menganalisis mikroplastik tanah di berbagai penggunaan lahan, termasuk padang rumput, pemukiman, TPA, pertanian, tambak, dan pesisir. Hasil menunjukkan konsentrasi mikroplastik bervariasi di setiap penggunaan lahan, dengan TPA memiliki konsentrasi tertinggi pada kedalaman 0-10 cm (23,4 partikel/gram). Area pemukiman memiliki konsentrasi yang konsisten di semua kedalaman, sementara padang rumput dan pertanian menunjukkan variasi kecil. Tambak ikan mengalami penurunan konsentrasi pada kedalaman menengah tetapi kemudian meningkat, sedangkan daerah pesisir memiliki konsentrasi terendah di semua kedalaman (rata-rata 17,1 partikel/gram).

Penelitian ini meneliti prevalensi dan karakteristik mikroplastik di tanah dari berbagai penggunaan lahan di Kota Makassar, Indonesia. Sampel tanah dikumpulkan dari padang rumput, pemukiman, TPA, lahan pertanian, tambak, dan daerah pesisir, lalu dianalisis untuk mengidentifikasi bentuk, warna, ukuran, dan jenis polimer mikroplastik. Hasilnya menunjukkan konsentrasi

mikroplastik yang bervariasi antar penggunaan lahan, dengan TPA memiliki konsentrasi tertinggi. Fragmen dan film adalah bentuk mikroplastik yang paling umum, dan polietilen (PE) serta polipropilen (PP) adalah jenis polimer yang paling banyak ditemukan. Sebagian besar mikroplastik berukuran di bawah 300 μm , meningkatkan potensi toksisitasnya karena luas permukaan yang besar.



Gambar I. 2. Beragam jenis sampel tanah yang memiliki konsentrasi mikroplastik

Sumber: Walenna et al., (2024),

Tingginya konsentrasi mikroplastik di Makassar disebabkan oleh pengelolaan sampah yang tidak efisien, perilaku masyarakat, dan potensi migrasi mikroplastik. Sumber mikroplastik bervariasi di setiap penggunaan lahan, dari plastik sekali pakai di pemukiman dan TPA hingga produk plastik

yang lebih tahan lama di lahan pertanian. Penelitian ini menyoroti perlunya pengelolaan sampah yang lebih baik dan upaya mengurangi polusi plastik, serta menekankan pentingnya penelitian lanjutan untuk memahami asal-usul, jalur, dan dampak toksikologis mikroplastik di tanah.

Dalam merespon permasalahan sampah dan pertimbangan dari UU Nomor 18 tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 yang menjelaskan perlunya perubahan mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu, dari kumpul–angkut–buang menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah. Pengurangan sampah tersebut dilakukan melalui *Reduce*, *Re-use* dan *Recycle* (3R). Bentuk pengurangan sampah melalui 3R yaitu Bank Sampah. Bank Sampah lahir dari Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah.

Pusat bank sampah adalah tempat kumpulnya sampah yang sudah dipilah. Sampah yang telah terkumpul tersebut, akan disetorkan ke pengepul atau tempat kerjanin. Pusat bank sampah pun dikelola seperti sistem perbankan, ada penyetor sebagai nasabah dan buku tabungannya. Pusat Bank Sampah bertujuan untuk membantu mengurangi jumlah timbulan sampah, membuat sampah menjadi sesuatu yang berguna, dan untuk memberdayakan masyarakat.

Di Kota Makassar sendiri kebijakan Pusat Bank Sampah ini ditindaklanjuti dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Makassar No. 63

Tahun 2014 tentang pembentukan UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah Kota Makassar. UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah adalah UPT Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan Perwali Kota Makassar No. 63 Tahun 2014, yang bertindak sebagai Pusat Bank Sampah Kota Makassar.

Tujuan dan fungsi dibentuknya Pusat bank sampah Kota Makassar adalah untuk mengolah sampah dari sumber, menciptakan lingkungan bersih, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah, dan mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pengolahan akhir (TPA). Pusat Bank sampah ini berfungsi sebagai instansi daerah yang memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan Bank Sampah Unit (BSU) di Kota Makassar, yang selanjutnya menjadi mitra UPTD Pusat Bank Sampah dalam mengelola sampah dengan menerapkan sistem 3R (*reduce, reuse, dan recycle*).

Peran Pusat Bank Sampah di Kota Makassar adalah sebagai sistem pengelolaan sampah non-organik yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Makassar sejak tahun 2015. Pusat Bank Sampah Kota Makassar berperan sebagai unit pelaksana teknis yang membantu dalam pendampingan dan fasilitasi terhadap pembentukan dan pengelolaan Bank Sampah Unit (BSU) yang menjadi mitra kerjanya. Pusat Bank Sampah di Kota Makassar memiliki sistem pengelolaan yang operasionalnya dilakukan oleh masyarakat sendiri, mirip dengan bank konvensional. Sistem ini melibatkan masyarakat dalam

pengumpulan, pemilahan, dan penjualan sampah, serta memberikan imbalan kepada mereka yang berhasil mengumpulkan sampah

Pusat Bank Sampah di Kota Makassar dikelola oleh UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah, PT. Unilever, Yayasan Peduli Negeri beserta komunitas masyarakat. UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah yang bertindak sebagai pemerintah berfokus kepada memaksimalkan pelayanan yang di berikan berupa dalam pengurangan timbulan sampah hingga mengelola Bank Sampah itu sendiri. PT. Unilever mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi setiap kegiatan terkait pengelolaan sampah. Yayasan Peduli Negeri memiliki tanggung jawab berupa pendampingan yang dilakukan kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan pengelolaah sampah. Masyarakat pun turut berpartisipasi guna membantu mengelola sampah tersebut.

Bank Sampah Unit dikelola oleh komunitas masyarakat, dan sampah dikumpulkan dan dipilah sesuai jenisnya dan dikelola menggunakan sistem seperti perbankan dengan diberikannya buku tabungan kepada nasabah. Sampah yang ditabung oleh masyarakat akan ditimbang dan dihargai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pengurus BSU. Hasil dari pengumpulan sampah di BSU tersebut selanjutnya dijual kepada UPTD Pengelolaan Daur Ulang Sampah Kota Makassar. Bank sampah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah dan menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat.

Berdasar data sekunder diperoleh dari penelitian Fatmawati et al., (2019) menemukan bahwa UPTD dalam mengelola sampah belum sebanding dengan jumlah masyarakat Kota Makassar. Rata-rata produksi sampah/orang/hari adalah 0,14 kg (Ismail, 2018). Jika jumlah penduduk kota makassar 1.469.601 jiwa dikali dengan 0,14 kg/hari maka idealnya jumlah sampah yang masuk adalah 20.566 kg/hari. Jumlah tersebut tidak sesuai dengan hasil yang dicapai di UPTD Pusat Bank Sampah.

Berdasarkan data Pusat Bank Sampah dibawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Makassar, di bulan Januari 2023 saja diperoleh 45 ton sampah pilah yang didominasi sampah plastik, kertas, logam dan jenis lainnya. Kontribusi tersebut masih jauh dari yang diharapkan dalam mengurangi beban volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir. Sebanyak 1.077 Bank Sampah yang tersebar di setiap kecamatan, jika dikelola dengan baik akan menjadi sumber penerimaan PAD (Beritakotamakassar.com, 2023).

Berikut perhitungan Produksi Sampah Harian Total (Rata-Rata):

- Rata-rata produksi sampah per orang per hari: 0,14 kg
- Jumlah penduduk Kota Makassar: 1.469.601 jiwa
- Total produksi sampah harian:

$$= 0,14 \text{ kg/orang/hari} \times 1.469.601 \text{ jiwa}$$

$$= \mathbf{20.566 \text{ kg/hari}}$$

Jumlah Sampah Terpilah pada Januari 2023 yaitu 45 ton/bulan = 1.500 kg/hari (diasumsikan dalam sebulan memiliki 30 hari). Kemudian dapat ditentukan kesenjangan sampah yang tidak terpilah yaitu:

$$= 20.566 \text{ kg} - 1.500 \text{ kg}$$

$$= \mathbf{19.066 \text{ kg/hari}}$$

Berikut adalah tabel yang menyajikan data produksi sampah harian di Kota Makassar berdasarkan data sebelumnya:

Tabel I. 1. Produksi Sampah Harian Di Kota Makassar

Kategori	Jumlah Sampah (kg/hari)	Persentase (%)
Sampah Terpilah	1.500	7,4
Sampah tidak terpilah	19.066	92,7
Total	20.566	100

Sumber: olah data peneliti (2024)

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa hanya sekitar 7,3% dari total produksi sampah harian yang berhasil terpilah (1.500 kg dari 20.566 kg). Sisanya, 92,7% atau 19.066 kg per hari, tidak terkelola dengan baik dan menjadi beban bagi TPA yang sudah overkapasitas. Kesenjangan ini menunjukkan urgensi untuk meningkatkan efektivitas Bank Sampah dan pengelolaan persampahan secara menyeluruh di Kota Makassar.

Kesenjangan dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar yang tercermin dari rendahnya persentase sampah yang terpilah (hanya 7,3% dari

total produksi harian) menunjukkan pentingnya peningkatan efektivitas program Bank Sampah.

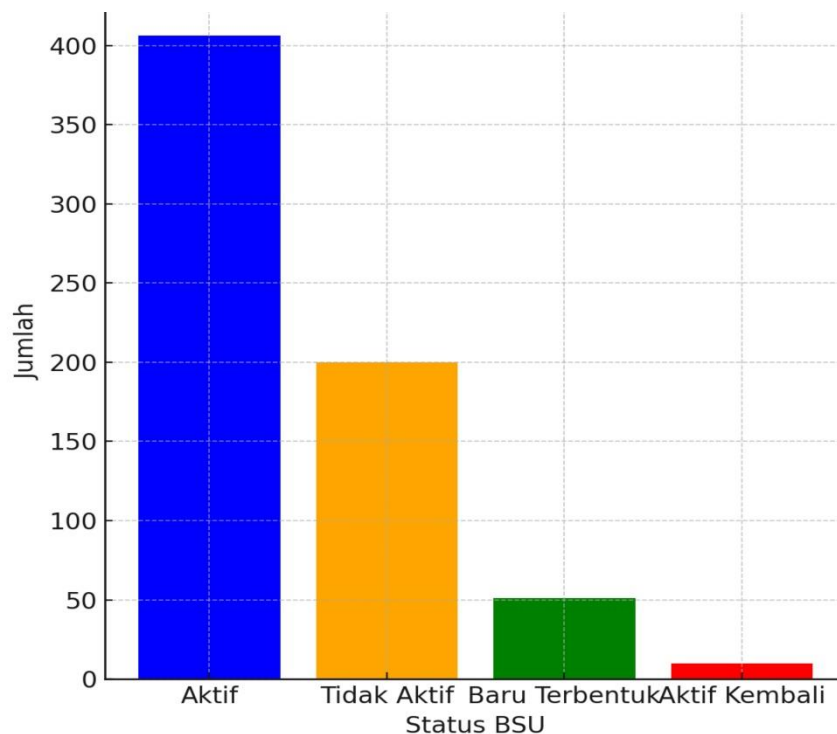
Sasaran dari program Pusat Bank sampah adalah warga masyarakat. Sebagaimana tujuan dari adanya bank sampah adalah mengolah sampah dari sumber. Rendahnya jumlah sampah yang masuk ke UPT BSP disebabkan oleh rendahnya peran serta masyarakat dalam mendukung program pengelolaan sampah berbasis Bank Sampah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya sampah yang terbuang secara sembarangan dan tidak dikelola oleh warga masyarakat di lingkungan sekitar. Berikut ini ditampilkan data bank sampah unit (BSU) Kota Makassar tahun 2024.

Tabel I. 2. Data Eksisting Bank Sampah Unit (BSU) Kota Makassar Tahun 2024

Kecamatan	Status Bank Sampah Unit					Nasabah			Lorong Wisata		
	Aktif	Tidak Aktif	Baru	Aktif kembali	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total	Ada	Tidak Ada	Total
Biringkanaya	45	18	3	1	67	1510	20	1530	24	43	67
Bontoala	9	13	3	0	25	347	0	347	0	25	25
Makassar	34	5	1	1	40	637	0	637	10	29	39
Mamajang	10	5	0	0	26	234	0	234	9	16	25
Manggala	68	11	5	1	80	1816	0	1816	19	56	75
Mariso	15	9	4	2	27	387	0	387	3	37	40
Panakkukang	45	22	12	0	70	2107	0	2107	16	63	79
Rappocini	33	16	13	0	28	916	0	916	12	36	48
Tallo	21	12	0	0	33	391	0	391	10	28	38
Tamalanrea	28	19	0	5	29	770	0	770	8	42	50
Tamalate	26	21	6	0	53	853	0	853	13	62	75
Ujung Tanah	27	4	0	0	30	403	0	403	10	21	31
Ujung Pandang	32	11	0	0	43	273	0	273	11	8	19
Wajo	15	8	2	0	31	60	0	60	3	5	8
Kep. Sangkarrang	5	1	2	0	8	60	0	60	3	5	8
Jumlah Total	406	200	51	10	667	9145	1310	10.455	222	438	660

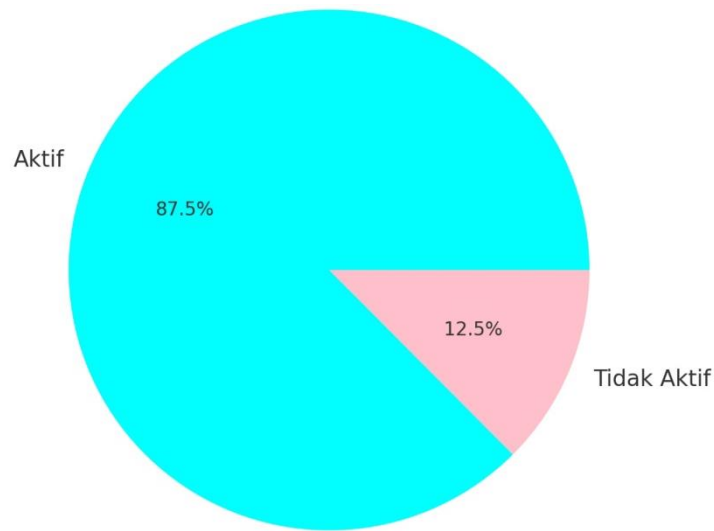
Sumber: Bank Sampah Pusat (September, 2024)

Berdasarkan tabel data eksisting Bank Sampah Unit (BSU) di Kota Makassar untuk tahun 2024 di atas, tercatat ada total 667 unit BSU. Dari jumlah tersebut, 406 unit (60,87%) berada dalam status aktif, sementara 200 unit (29,99%) tidak aktif. Selain itu, ada 51 unit BSU yang baru terbentuk (7,65%) dan 10 unit yang aktif kembali (1,50%). Untuk nasabah, totalnya mencapai 10.455 orang, dengan 9.145 orang (87,47%) tercatat sebagai nasabah aktif dan 1.310 orang (12,53%) sebagai nasabah tidak aktif. Berikut adalah visualisasi grafik data Bank Sampah Unit (BSU) di Kota Makassar tahun 2024.



Gambar I. 3. Status BSU di Kota Makassar per September 2024

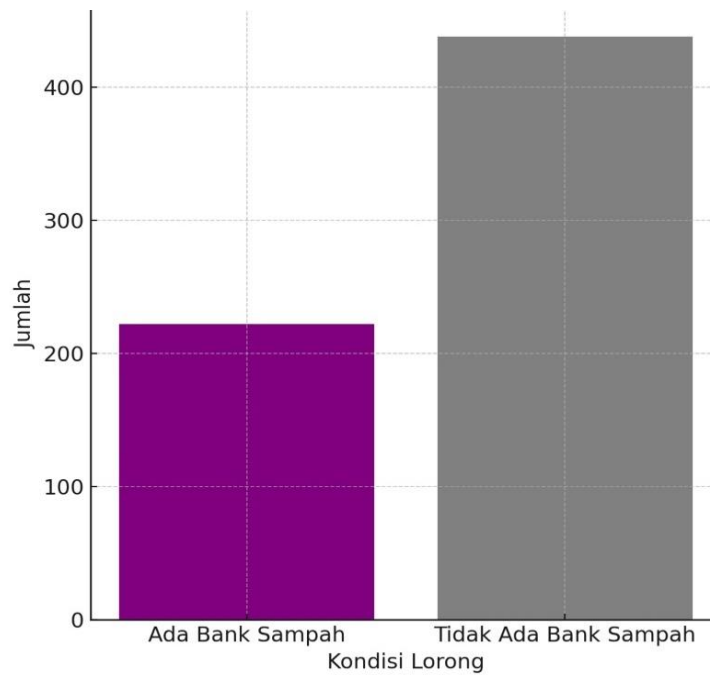
Sumber: data primer diolah peneliti (2025)



Gambar I. 4. Persentase Nasabah Bank Sampah (2024)

Sumber: data primer diolah peneliti (2025)

Pada sisi lain, terkait dengan lorong wisata, terdapat total 660 lokasi, di mana 222 lokasi (33,64%) memiliki Bank Sampah, sementara 438 lokasi (66,36%) tidak memiliki. Jika dianalisis berdasarkan kecamatan, Kecamatan Manggala memiliki jumlah nasabah aktif tertinggi dengan 1.816 orang, sementara Kecamatan Biringkanaya memimpin dalam jumlah BSU aktif dengan 45 unit. Sebaliknya, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang mencatatkan jumlah BSU aktif terendah, yaitu hanya 5 unit.



Gambar I. 5. Kondisi Lorong Wisata terkait BSU (2024)

Sumber: data primer diolah peneliti (2025)

Dari data ini, terlihat bahwa BSU yang aktif mendominasi dengan proporsi lebih dari 60%, namun masih terdapat banyak BSU yang tidak aktif, memberikan peluang untuk melakukan reaktivasi. Sementara itu, meskipun terdapat 222 lokasi lorong wisata yang memiliki bank sampah, angka ini masih tergolong rendah (33,64%), yang menunjukkan adanya potensi pengembangan dan perluasan lebih lanjut dalam penerapan Bank Sampah di kawasan-kawasan tersebut.

Pusat Bank sampah di Kota Makassar yang mulai beroperasi sejak tahun 2011 sebanyak 9 unit bank sampah. Pada Tahun 2012 bank sampah di Kota Makassar sebanyak 43 unit, meningkat pada tahun 2015 terdapat 104

unit, hingga pada tahun 2018 sebanyak 1.000 unit bank sampah. Tidak semua bank sampah tersebut dari masyarakat, ada yang dari inisiasi di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), ada bank sampah sekolah, dan ada dari instansi-instansi pemerintah. Beberapa bank sampah tersebut hanya terdengar namanya saja dimana sekitar 600 hingga 700 unit yang berjalan efektif dan selebihnya tidak ada aktivitas pengelolaan sampah didalamnya.

Masalah lain terkait pengelolaan Pusat Bank Sampah di Kota Makassar yaitu kurangnya koordinasi antar lembaga dalam pemerintahan di tingkat kelurahan. Koordinasi yang dimaksud disini adalah koordinasi antara UPT BSP dan pihak kelurahan/kecamatan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sosialisasi sangat penting bagi masyarakat terkait program Pusat Bank Sampah dan penerapan prinsip 3R. Selama ini sosialisasi tentang Pusat Bank sampah sangat kurang dilakukan oleh UPT, karena pihak UPTD menganggap bahwa sosialisasi dan pendampingan itu merupakan tanggung jawab pihak kelurahan atau kecamatan (Fatmawati et al., 2019).

Pelaksanaan program Pusat Bank Sampah Pemerintah Kota Makassar tidak dapat dipisahkan dari alur birokrasi yang ada sebagai penyelenggara negara. Birokrasi pemerintah pada dasarnya adalah alat pemerintah yang bekerja untuk kepentingan masyarakat secara komprehensif. Dengan demikian maka tugas birokrasi pemerintah adalah merealisasikan setiap kebijakan dan program pemerintah demi kepentingan masyarakat. Namun

sebagaimana kita ketahui bahwa secara umum birokrasi di Indonesia masih lambat dan berbelit. Hal itulah yang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat.

Fenomena yang terjadi dalam pengelolaan bank sampah di Kota Makassar dapat dianalisis menggunakan konsep *Dynamic Governance* yang dikemukakan oleh Boon Siong Neo dan Geraldine Chen. Konsep ini menyoroti pentingnya budaya organisasi, kapabilitas dinamis, dan perubahan dalam menciptakan sistem tata kelola yang responsif dan berkelanjutan.

Dalam konteks bank sampah di Makassar, budaya organisasi yang terbentuk mencerminkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang sejalan dengan pendekatan budaya dalam *dynamic governance* yang memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Neo dan Chen (2007), budaya organisasi yang inklusif dan partisipatif adalah fondasi yang mendukung kelancaran program, di mana keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam efektivitas pengelolaan.

Mengingat tantangan yang muncul dalam pengelolaan sampah dapat berubah dengan cepat, pengelola Bank Sampah di Makassar harus memiliki fleksibilitas dalam kebijakan dan operasional untuk mengatasi masalah seperti lonjakan sampah atau perubahan perilaku masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sampah bisa lebih responsif terhadap perubahan dan berkembang sesuai kebutuhan. Selain itu, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat,

sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang komprehensif.

Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi *dynamic governance* dalam pengelolaan bank sampah di Pemerintah Kota Makassar. Secara spesifik, penelitian ini akan mengeksplorasi tiga aspek utama: pertama, budaya organisasi yang diterapkan dalam pengelolaan bank sampah, kedua, kapabilitas dinamis yang tercermin melalui pendekatan *thinking ahead*, *thinking again*, serta *thinking across*, dan ketiga, perubahan yang terjadi dalam pengelolaan sampah setelah adanya program bank sampah di Kota Makassar. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Analisis *Dynamic Governance* dalam Pengelolaan Bank Sampah Pemerintah Kota Makassar”**

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana budaya organisasi yang diterapkan dalam pengelolaan bank sampah di Pemerintah Kota Makassar?
2. Bagaimana kapabilitas dinamis yang diterapkan melalui pendekatan *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across* dalam pengelolaan bank sampah di Kota Makassar?

3. Bagaimana perubahan yang terjadi dalam pengelolaan sampah setelah adanya program bank sampah di Kota Makassar ?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan bank sampah di Kota Makassar.

1. Menganalisis budaya organisasi yang diterapkan dalam pengelolaan bank sampah di Pemerintah Kota Makassar, serta dampaknya terhadap keterlibatan masyarakat dan efektivitas pengelolaan sampah.
2. Mengeksplorasi kapabilitas dinamis yang diterapkan dalam pengelolaan bank sampah di Kota Makassar melalui pendekatan thinking ahead, thinking again, dan thinking across, serta bagaimana pendekatan-pendekatan ini berkontribusi terhadap pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
3. Menganalisis perubahan yang terjadi dalam pengelolaan sampah setelah adanya program bank sampah di Kota Makassar, baik dari segi sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang mendukung keberhasilan program.

I.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang *dynamic governance* dalam pengelolaan sampah, khususnya yang berkaitan dengan budaya organisasi, kapabilitas dinamis, dan perubahan program pengelolaan sampah.
- b. Penelitian ini memberikan wawasan lebih dalam mengenai pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan kebijakan lingkungan, serta hubungan antara kebijakan dan keberlanjutan program bank sampah..

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi kota lain dalam merancang dan mengelola program bank sampah yang efektif.
- b. Penelitian ini membantu Pemerintah Kota Makassar dan pengelola bank sampah untuk meningkatkan efektivitas program dengan memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan sampah.
- c. Hasil penelitian dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis komunitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Perspektif *Governance* dalam Administrasi Publik

Paradigma administrasi publik dimulai dengan *Old Public Administration* yang juga dikenal dengan sebutan administrasi negara tradisional atau klasik. Tokoh paradigma ini adalah antara lain pelopor berdirinya ilmu administrasi negara Woodrow Wilson serta F.W.Taylor dengan bukunya "*Principles of scientific Management*". Dalam bukunya "*The Study of Administration*", Wilson (1887) berpendapat bahwa problem utama yang dihadapi pemerintah eksekutif adalah rendahnya kapasitas administrasi. Untuk mengembangkan birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien, diperlukan pembaharuan administrasi pemerintahan dengan jalan meningkatkan profesionalisme manajemen administrasi negara.

Ide-ide yang berkembang pada tahun 1900-an memperkuat paradigma dikotomi politik dan administrasi, seperti karya Frank Goodnow "*Politic and Administration*". Karya fenomenal lainnya adalah tulisan Frederick W. Taylor (1919) "*Principles of Scientific Management*". Taylor adalah pakar manajemen ilmiah yang mengembangkan pendekatan baru dalam manajemen pabrik di sector swasta –*Time and Motion Study*. Metode ini menyebutkan ada cara terbaik untuk melaksanakan tugas tertentu. Manajemen ilmiah dimaksudkan untuk meningkatkan output dengan menemukan metode produksi yang paling

cepat, efisien, dan paling tidak melelahkan.

Pada tahun 1927-1937 muncul prinsip untuk paradigma kedua yang mengembangkan prinsip-prinsip administrasi negara, bahwa terdapat perkembangan baru dalam administrasi negara dan mencapai puncak reputasinya. Sekitar tahun 1930-an administrasi negara banyak mendapat masukan dari bidang lain seperti industrial dan pemerintahan. Bahwa administrasi negara dapat menempati semua tatanan kehidupan. Tokoh pemikiran pada periode ini antara lain; Mary Parker Follet, Henry Fayol, Frederick W. Taylor (*Principle of Scientific Management*), Max Weber yang memfokuskan pada pengaruh manajemen terhadap administrasi negara.

Tema pokok NPM adalah menggunakan mekanisme pasar sebagai terminologi sektor publik dengan cara para pimpinan dituntut untuk; berinovasi untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi pemerintah; pemimpin melakukan *steering*, membatasi terhadap pekerjaan atau fungsi mengendalikan, gaya pimpinan yang memberikan arah yang strategis; menitikberatkan pada mekanisme pasar dalam mengarahkan program publik; menghilangkan monopoli pelayanan publik yang tidak efisien yang dilakukan oleh instansi dan pejabat pemerintah; dalam birokrasi publik diupayakan agar para pimpinan brokrasi meningkatkan produktivitas dan menenukan alternative cara pelayanan publik berdasarkan perspektif ekonomi; pimpinan didorong untuk memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan, meningkatkan kinerja, melakukan restrukturisasi lembaga

birokrasi publik, merusmuskan kembali misi organisasi, melakukan *streamlining* pada proses dan prosedur birokrasi dan melakukan desentralisasi proses pengambilan kebijakan.

Dalam melakukan upaya perbaikan birokrasi, pada tahun 1992, David Osborne dan Ted Gaebler menerbitkan buku *Reinventing Government* yang dilanjutkan dengan buku *Banishing Bureaucracy* pada tahun 1997. *Reinventing Government* merupakan salah satu aplikasi NPM yang pada hakikatnya adalah upaya untuk mentransformasikan jiwa dan kinerja wiraswasta (*entrepreneurship*) ke dalam birokrasi pemerintah. Jiwa *entrepreneurship* menekankan pada upaya peningkatan sumber daya baik ekonomi, sosial, budaya, politik yang dimiliki pemerintah untuk menjadi lebih produktif dan berproduksi tinggi (Osborne dan Gaebler, 1992).

Setelah konsep dari Denhardt dan Denhardt mengenai *Old Public Administration* (teori klasik dan neoklasik) dan *New Public Management*, maka konsep yang ketiga adalah New Public Service (NPS). Ada tujuh prinsip NPS Denhardt dan Denhardt (2015) yang berbeda dari NPM dan OPA yaitu : Pertama; Peran utama dari pelayanan publik adalah membantu masyarakat mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan yang telah disepakati bersama, dari pada mencoba mengontrol atau mengendalikan masyarakat ke arah yang baru. Kedua, administrasi publik harus menciptakan gagasan kolektif yang disetujui bersama tentang apa yang disebut sebagai kepentingan publik. Ketiga, kebijakan dan program yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

publik dapat dicapai secara efektif dan responsive melalui upaya-upaya kolektif dalam proses kolaboratif. Keempat, kepentingan publik lebih merupakan hasil suatu dialog tentang nilai-nilai yang disetujui bersama dari pada agregasi kepentingan pribadi para individu.

Kelima, para pelayan publik harus memberi perhatian tidak semata pada pasar, tetapi juga aspek hukum dan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standard professional dan kepentingan warga masyarakat. Keenam, organisasi publik dan jaringan-jaringan yang terlibat akan lebih sukses dalam jangka panjang kalau mereka beroperasi melalui proses kolaborasi dan melalui kepemimpinan yang menghargain semua orang, dan Ketujuh kepentingan publik lebih dikembangkan oleh pelayan-pelayan publik dan warga masyarakat, dari pada oleh manager wirausaha yang bertindak seakan-akan uang milik mereka.

Paradigma *new public governance* hadir selain sebagai paradigma baru untuk menggantikan paradigma *public administration* dan paradigma *new public service* juga sebagai satu cara terbaik *the one best way* untuk menjawab tantangan implementasi kebijakan publik dan penyediaan layanan publik abad-21 (Haryono, 2012:49). Kedua, term “*governance*” dan “*public governance*” bukan term baru. Kritik pada terminologi *corporate governance*, *good governance*, dan *public governance*. *Corporate governance* memfokuskan pada internal sistem dan proses dimana menyediakan arahan dan accountability pada organisasi lain. Pada pelayanan publik memfokuskan pada

hubungan antara pembuat kebijakandan organisasi publik. *Good governance* memfokuskan pada penyebaran model sosial normatif, politik, dan *administrative governance* oleh organisasi supranasional seperti World Bank.

New public governance memfokuskan pada lima prinsip diantaranya: Pertama, *social-political governance* memfokuskan relasi institusi dengan masyarakat. Kooiman (1999) mengatakan hubungan dan interaksi harus dipahami untuk memahami implementasi kebijakan publik. Kedua, *public policy governance*, memfokuskan pada bagaimana para elit pengambil kebijakan berinteraksi untuk membuat dan memutuskan proses kebijakan publik.

Ketiga, *administrative governance* memfokuskan pada efektifitas aplikasi dari public administration untuk menyelesaikan masalah implementasi kebijakan publik abad 21. Keempat, *contract governance* memfokuskan pada kontrak dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya tanggung jawab pada pelayanan publik. Kelima, *network governance* memfokuskan pada mengorganisir diri pada jaringan interorganisasional. Fungsi dimana dengan atau tanpa pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik.

Semua perspektif teori *governance* diatas merupakan kontribusi penting pada pemahaman kita mengenai implementasi kebijakan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik. Tantangan besar bagi pengembangan administrasi negara adalah mengintegrasikan formula terbaik “the one best way” dalam menjawab tantangan implementasi kebijakan public dan

penyediaan layanan publik.

Perubahan dalam kehidupan sosial terjadi begitu cepat dan seringkali tidak bisa di prediksi. perubahan yang seperti itu, tentunya, berpengaruh terhadap organisasi publik. Agar tetap *survive*, maka organisasi publik perlu beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Perubahan lingkungan yang seperti ini akan “memaksa” terjadinya perubahan paradigma dalam organisasi publik menuju suatu paradigma baru administrasi publik, yaitu, *modern governance* (Kooiman, 1994).

Paradigma *modern governance* mendorong pemerintah untuk tidak jalan sendiri dalam pengelolaan negara, melainkan perlunya keterlibatan swasta dan masyarakat itu sendiri. Sinergisasi dari ketiga pilar bangsa/ negara tersebut (pemerintah, swasta, dan masyarakat) merupakan fokus utama dalam pendekatan *governance* (Kooiman, 1994; Tjokroamidjojo, 2000).

Rochman (2008:142) memberi definisi *Governance* sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor Negara dan sektor nonpemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. *Governance* adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya (Widodo, 2001).

Konsep *governance* dikembangkan sebagai bentuk kekecewaan terhadap konsep *government* yang menjadi titik tekan paradigma tradisional dan menyempurnakan konsep-konsep yang diusung oleh paradigma New

Public Management (NPM). Dalam konsep government, Negara merupakan institusi public yang mempunyai kekuatan memaksa secara sah yang merepresentasikan kepentingan publik. *Governance* lebih merupakan kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yakni: pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) dan usahawan (*business*) yang berada di sektor swasta (Taschereau dan Campos, 1997 dalam Thoha, 2014).

Dalam pengertian yang lebih kompleks, United Nations Development Programme (UNDP) menegaskan *“it is the complex mechanisms, process, relationships and institutions through which citizens and groups articulate their interests, exercise their rights and obligations and mediate their differences”*. pemerintahan adalah suatu institusi, mekanisme, proses, dan hubungan yang kompleks sebagai jalan bagi warga Negara (citizens) dan kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya, dan menengahi atau memfasilitasi perbedaan-perbedaan di antara mereka (Widodo, 2001:108).

Unsur utama yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut UNDP terdiri atas tiga macam, yaitu the state (negara/pemerintah), the private sector (swasta), dan civil society organization (organisasi masyarakat). Hubungan di antara ketiga unsur utama dalam penyelenggaraan *governance* tentunya saling mempengaruhi, saling membutuhkan, atau bahkan

saling ketergantungan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Widodo, 2001:110).

Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjelaskan *governance* dari segi aspek fungsionalnya, sebagai berikut: “*governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau sebaliknya” (LAN, 2000). Sementara United Nations Development Programme (1997) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affairs at all levels*” (Thoha, 2008:62).

Governance merupakan pelibatan semua pemangku kepentingan dalam proses penentuan dan implementasi kebijakan publik. Dalam pelibatan tersebut, pemerintah telah menunjukkan bahwa ia bukan lagi pemain utama dalam kebijakan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana diidentifikasi oleh paradigma klasik administrasi publik. Kebersamaan ini, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta menunjukkan adanya dukungan dan pemanfaatan sumber-sumber daya penting dalam pembangunan bangsa dan penyelenggaraan pelayanan publik.

II.2. Konsep *Dynamic Governance*

1. Pengertian *Dynamic governance*

Istilah *governance* telah lama kita kenal yaitu menunjuk pada hubungan antara pemerintah/negara dengan warganya sehingga

memungkinkan berbagai kebijakan dan program dapat di rumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi.

Kaufmann et al., (2011) mengatakan “*Governance is the relationship between governments and citizens that enable public policies and programs to be formulated, implemented and evaluated. In the broader context, it refers to the rules, institutions, and networks that determine how a country or an organization functions*” (Governance atau pemerintahan adalah hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya yang memungkinkan berbagai kebijakan publik dan program dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi). Dalam konteks lebih luas menunjuk pada sejumlah aturan, institusi, dan jaringan yang menentukan berfungsinya suatu negara atau organisasi).

Sedangkan dari perspektif sektor publik, Tan (2004) memaknai Governance sebagai “*the manner in which the government, working together with other stakeholders in society, exercises its authority and influence in promoting the collective welfare of society and the long- terms interested of the nation*” (Cara dimana pemerintah bekerjasama dengan pemangku kepentingan lain dalam masyarakat, menerapkan kewenangan dan mempengaruhi dalam mengusahakan kesejahteraan masyarakat dan tujuan jangka panjang dari suatu bangsa).

Oleh karena menyangkut penentuan cara pemerintah mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan jangka

panjang dari suatu bangsa, maka pada negara demokratis cara yang ditempuh adalah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan, penetapan institusi dan pola hubungan antar pemangku kepentingan.

Terkait dengan pemahaman tersebut, Neo dan Chen (2007:52) memaknai *Governance* sebagai “ *the choosen path, policies, institutions and the resultant structures that collectively provide the incentives and constraints to facilitate or impede interactions that lead to economic progress and social wellbeing*” (penentuan berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang dipilih, yang secara bersama mendorong untuk memudahkan interaksi kearah kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial lebih baik).

Selanjutnya, dari makna tersebut, Neo dan Chen (2007) merumuskan *Dynamic governance* sebagai “*to how these choosen paths, policies, institutions, and structures adapt to an uncertain and fast changing envinronment so that they remain relevant and efektif in achieving the long-term desired outcomes of society*” (bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang telah dipilih sehingga dapat beradaptasi dengan ketidakmenentuan dan perubahan lingkungan yang cepat sehingga kebijakan, institusi dan struktur tersebut tetap relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka panjang masyarakat).

Dynamic governance secara sederhana dipahami sebagai aktivitas

pemerintah dalam proses penyelenggaraan kebijakan publik dengan menyesuaikan pada hasil analisis perkembangan internal dan eksternal lingkungan institusi. Neo dan Chen dalam hal ini mendefinisikan *dynamic governance* sebagai kemampuan pemerintah untuk secara berkelanjutan dalam menyesuaikan cara memformulasikan serta menyelenggarakan berbagai kebijakan dan program publiknya sehingga kepentingan jangka panjang bangsa dapat tercapai (Neo dan Chen, 2007:8).

Sebagaimana institusi menghadapi berbagai perubahan lingkungan dan tuntutan masyarakat yang berkembang, maka *dynamic governance* hadir sebagai solusi untuk menghadapi hal tersebut, sehingga organisasi dapat terus bergerak secara adaptif dan tetap mempertahankan performa dan eksistensi mereka.

2. Elemen dan Sistem *Dynamic governance*

Dynamic governance pada dasarnya hanya menekankan pada dua komponen utama yaitu kapabilitas dinamis (*dynamic capabilities*) dan budaya organisasi (*institutional cultures*), dimana kedua komponen ini akan menggerakkan sumberdaya manusia dan proses mengarah pada perubahan berbagai kebijakan yang adaptif menuju pada *dynamic governance* yang lebih jelasnya dua elemen dari *dynamic governance* menurut Neo dan Chen (2007:12) adalah:

- a. Pertama merupakan budaya organisasi pemerintah meliputi; *integrity* (integritas), *incorruptibility* (tidak dapat disuap/tidak korupsi),

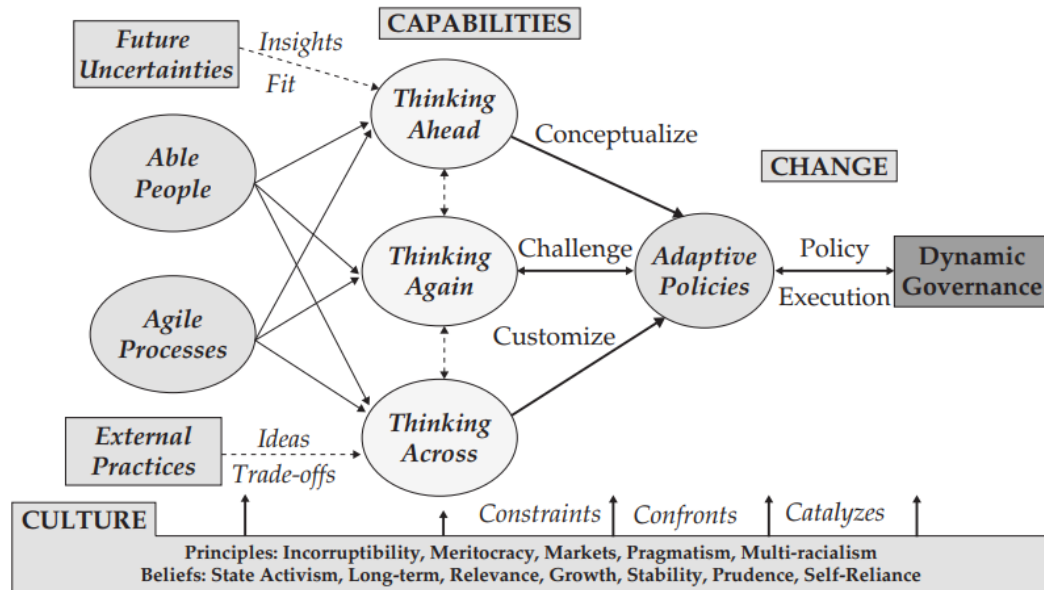
meritocracy (berdasar bakat dan kemampuan/prestasi), *market* (orientasi pasar yang berkeadilan), *pragmatism* (mudah menyesuaikan/ lebih berorientasi pada pencapaian tujuan negara daripada berkuat soal ideologi), *multi-racialism* (berbagai etnik dan kepercayaan), termasuk juga dalam budaya adalah ; aktivitas negara (*state activism*), rencana dan tujuan jangka panjang (*long term*), kebijakan yang sesuai kehendak masyarakat (*relevance*), pertumbuhan (*growth*), stabilitas (*stability*), bijaksana (*prudence*), dan mandiri (*self-reliance*);

- b. Kedua, kemampuan yang dinamis meliputi: *thinking ahead* (berpikir ke depan), *thinking again* (mengkaji ulang), dan *thinking across* (belajar dari pengalaman negara / organisasi lain).

Kedua elemen pokok di atas ditopang oleh *able people* dan *agile processes* (orang yang berkemampuan dan dilakukan dengan proses yang baik), serta dipengaruhi oleh *future uncertainties and external practise* (ketidakpastian masa mendatang dan praktek/kebiasaan negara atau organisasi lain).

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa satu konsep *Dynamic governance* merupakan kombinasi antara budaya dengan kapabilitas yang menghasilkan perubahan dimana didasarkan pada Budaya yang menunjukkan keyakinan dan nilai-nilai kelompok tertentu yang dibagi atau dimiliki bersama, sehingga dapat dianggap sebagai akumulasi pelajaran

bersama dari masyarakat tertentu berdasarkan sejarah pengalaman bersama yang berwujud menjadi satu tataran nilai kehidupan. Kerangka dasar elemen-elemen di atas digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Dynamic Governance

Sumber: Neo dan Chen, 2007 :13

Dalam kerangka konseptual *Dynamic governance* terdiri dari Budaya, Kemampuan dan perubahan, dimana ketiganya dapat dimaksimalkan ketika mampu bekerja secara interaktif dan sinergis sebagai bagian dari sistem dinamis. Kemampuan berpikir ke depan, berpikir lagi dan berpikir lintas batas juga seharusnya tidak hanya sekadar menjadi satu keterampilan yang berdiri sendiri dan tidak boleh beroperasi sebagai proses independen namun kemampuan ini terdapat hubungan yang saling berkaitan dan jika mereka terhubung secara interdependen bekerja sebagai

sebuah sistem, efek potensi mereka dapat diperkuat dan dampak keseluruhan diperkuat.

Konsep ini menyangkut penentuan cara mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan jangka panjang dari suatu bangsa, maka pada negara demokratis cara yang ditempuh adalah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan, penetapan institusi dan pola hubungan antar pemangku kepentingan. Terkait dengan pemahaman tersebut, Neo dan Chen (2007) menjelaskan *governance* sebagai penentuan berbagai kebijakan, institusi, dan struktur yang dipilih, yang secara bersama mendorong untuk memudahkan interaksi kearah kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial yang lebih baik.

Selanjutnya dari makna tersebut, konsep Neo dan Chen (2007) merumuskan *dynamic governance* sebagai “*to how these choose paths, policies, institutions, and structures adapt to an uncertain and fast changing environment so that they remain relevant and effective in achieving the long-term desired outcomes of society*” (bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan, institusi, dan struktur yang telah dipilih sehingga dapat beradaptasi dengan ketidakmenentuan dan perubahan lingkungan yang cepat sehingga kebijakan, institusi, dan struktur tersebut tetap relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka panjang masyarakat).

Kapabilitas dinamis merujuk pada kemampuan institusi dalam

mendesain berbagai aktivitas dan pengelolaan sumberdaya menjadi lebih efektif dalam berdasarkan hasil analisis perubahan lingkungan internal dan eksternal institusi. Teece dalam hal ini memaparkan bahwa “*dynamic capabilities is the firm's ability to integrate, build, and reconfigure internal and external competencies to address rapidly changing environment*” (kemampuan dinamis adalah kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan, membangun, dan mengkonfigurasi ulang kompetensi internal dan eksternal untuk mengatasi lingkungan yang berubah dengan cepat) (Helfat et al., 2007:2).

Dalam melihat kapabilitas dinamis sebuah organisasi, dapat dilihat dari pola pikir kapabilitas dinamis yang diterapkan institusi tersebut, dalam hal ini Neo dan Chen (2007) mengatakan bahwa kapabilitas dinamis terdiri atas 3 pola pikir, yaitu *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*.

a. *Thinking Ahead*

Pertama *Thinking Ahead* merupakan kemampuan mengidentifikasi faktor lingkungan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan masa mendatang, memahami dampaknya terhadap sosiol-ekonomi masyarakat, mengidentifikasi pilihan-pilihan investasi yang memungkinkan masyarakat memanfaatkan kesempatan baru dan menghindari potensi ancaman yang dapat menghambat kemajuan masyarakat. Berfikir ke depan ini akan mendorong institusi pemerintah untuk menilai dan meninjau kembali kebijakan dan strategi sedang

berjalan, memperbaharui target dan tujuan, dan menyusun konsep baru kebijakan yang dipersiapkan menyongsong masa depan.

Berpikir ke depan bukan sekedar meramalkan masa depan yang penuh ketidakpastian dan sekedar membuat perencanaan formal tetapi lebih dari itu adalah mengajak orang untuk berfikir strategis sehingga mereka dapat melihat kegiatan pembangunan masa depan yang lebih masuk akal, berbeda dengan apa yang mereka angankan (Lewis dan Gilman, 2013). Oleh karena meninjau masa depan merupakan latihan berfikir untuk menggali sinyal-sinyal yang akan menghampiri / datang, sehingga menjadikan kita peka terhadap kemungkinan hambatan yang akan kita lalui di masa depan. Proses berpikir ke depan atau meninjau masa depan ini meliputi:

- 1) Menggali berbagai kemungkinan dan antisipasi terhadap berbagai kecenderungan masa depan yang memiliki dampak signifikan terhadap tujuan kebijakan;
- 2) Merasakan dampak pembangunan terhadap pencapaian tujuan pembangunan sedang berjalan, dan menguji efektivitas kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan;
- 3) Menentukan pilihan-pilihan yang akan digunakan sebagai persiapan menghadapi timbulnya ancaman terhadap peluang yang baru; dan
- 4) Mempengaruhi para pembuat kebijakan kunci dan para pemangku kepentingan untuk memperhatikan isu-isu yang muncul secara

serius dan mengajak mereka untuk membicarakan kemungkinan respon/ tanggapan yang akan diambil.

b. *Thinking Again*

Kedua *Thinking Again* merupakan kemampuan meninjau kembali berbagai kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan. Apakah hasil yang dicapai oleh kebijakan, strategi, dan program telah memenuhi harapan banyak pihak atau perlu didesain ulang untuk mendapatkan kualitas hasil yang lebih baik. Kerangka waktu melakukan kaji ulang mulai dari kondisi yang sekarang dihadapi sampai masa waktu berlakunya kebijakan, strategi, dan program, dengan membandingkan apa yang dicapai dengan apa yang diinginkan.

Pengkajian ulang dilakukan terhadap hal-hal yang sudah terjadi mencakup pemanfaatan data, informasi-informasi baru, ukuran /standar yg telah ditentukan, warisan masalah dari suatu kebijakan atau program, dan umpan balik yang diterima. Kaji ulang dimaksudkan untuk melihat kelaikan dan kecocokan kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan dengan kondisi sedang dihadapi dan masa mendatang akibat perubahan lingkungan global yang cepat. Proses memikirkan kembali / kaji ulang meliputi:

- 1) Menganalisis dan meninjau kinerja terakhir berdasarkan umpan balik masyarakat;
- 2) Mencari penyebab mendasar tercapai atau tidak tercapainya

sebuah target;

- 3) Meninjau kembali kebijakan, strategi, dan program untuk mengidentifikasi faktor-faktor menonjol penyebab keberhasilan dan kegagalan;
- 4) Mendisain kembali kebijakan dan program, sebagian atau seluruhnya sehingga kinerja dapat diperbaiki dan tujuan tercapai secara lebih baik; dan
- 5) Menerapkan kebijakan dan sistem baru sehingga masyarakat dan pelanggan menikmati pelayanan dan outcome lebih baik.

c. *Thinking Across*

Ketiga *Thinking Across* merupakan kemampuan untuk mengadopsi pikiran, pendapat, ide-ide lain di luar kerangka berpikir (mindset) yang secara tradisional telah melekat dan menjadi dasar melakukan sesuatu. Dengan belajar dari pengalaman dan pemikiran orang lain dalam mengelola sebuah negara atau pemerintahan akan didapat ide-ide dan pemikiran segar dalam melakukan inovasi bagi perbaikan kebijakan, strategi, dan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Falsafah dasar dalam *thinking across* ini adalah *present-outside*, *future-inside* yang dapat dimaknai saat ini pikiran-pikiran brilian, kebijakan, strategi dan program yang baik-baik masih menjadi milik negara atau organisasi lain tetapi ke depan akan menjadi milik kita. Belajar dari pihak

lain bukan sekedar teknis operasional, tetapi lebih penting dari itu adalah menyangkut mengapa pihak lain dapat menyelesaikan masalah yang sama dengan cara berbeda, bagaimana mereka mendisain suatu kebijakan atau program sesuai dengan karakteristik kemajuan masyarakat setempat, dan lain-lain yang bersifat inovatif dan kreatif.

Proses thinking across ini meliputi:

- 1) Mencari dan menemukan praktek-praktek implementasi suatu kegiatan/ program yang kurang lebih sama/ memiliki kemiripan;
- 2) Refleksikan atau gambarkan tentang apa yang mereka lakukan, mengapa dan bagaimana mereka melakukan, ambil pelajaran dari pengalaman yang mereka lakukan;
- 3) Evaluasi apa yang dapat diterapkan pada kontek lokal (tempat kerja, masyarakat setempat/lokal), pertimbangkan hal-hal dan kondisi unik yang mungkin dapat diterima masyarakat lokal;
- 4) Ungkapkan hubungan antara ide-ide baru atau kombinasikan ide-ide berbeda yang dapat menciptakan pendekatan yang inovatif terhadap isu-isu yang muncul; dan
- 5) Sesuaikan kebijakan dan program dengan kebutuhan setempat/lokal.

Proses berpikir ke depan, berpikir ulang, dan berpikir ke luar dari mindset yang sudah terbentuk merupakan proses pembelajaran yang harus

dilakukan oleh pemerintah karena: a) Pertama, untuk memahami pengaruh dari masa`depan terhadap perkembangan dalam negeri sehingga dapat dipersiapkan suatu kebijakan yang memungkinkan warganya mengatasi masalah yang akan dihadapi. b) Kedua, Kerusakan lingkungan fisik dan non fisik akan berdampak pada mandulnya kebijakan meskipun telah dibuat sebaik dan seteliti mungkin. Oleh karena itu proses peninjauan ulang (thinking again) perlu dilakukan untuk menilai apakah kebijakan tersebut masih relevan dengan agenda nasional atau tujuan jangka panjang. c) Ketiga, dalam pemikiran baru tentang ekonomi, untuk tetap bertahan memerlukan pembelajaran dan inovasi untuk menghadapi tantangan baru sehingga tercipta berbagai kesempatan dan peluang. Untuk itu pemerintah perlu melihat perkembangan negara lain agar dapat diterapkan di dalam negeri.

Kerangka Pemikiran *Dynamic governance* di atas tampak bahwa kemampuan untuk melakukan thinking ahead, thinking again, dan thinking across harus didukung oleh orang yang memiliki kemampuan (*able people*) dan harus dilakukan dengan proses yang baik/benar (*agile processes*). Orang yang berkemampuan artinya adalah orang-orang yang dapat atau mampu membaca masa depan yang akan menghampiri berdasarkan fakta, gejala dan perkembangan masa kini ditambah proyeksi akibat perubahan global yang cepat.

Thinking ahead dipengaruhi secara tidak langsung oleh masa depan

yang tidak menentu (*future uncertainties*) yang dapat terjadi karena instabilitas socio-ekonomi , politik maupun karena terorisme dan bencana alam. Ketidakmenentuan masa depan ini akan memberi wawasan (*insight*) bagi pencarian kebijakan yang cocok (*fit*) untuk membangun sebuah konsep (*conceptualize*) baru dalam mengadopsi suatu kebijakan yang adaptif(*adaptive policies*).

Demikian juga dengan *thinking across* secara tidak langsung dipengaruhi oleh praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan (*external practices*) negara lain, dan akan melahirkan ide-ide/pemikiran (*ideas*) baru yang didapat melalui pertukaran pengalaman (*trade-offs*) dan pada gilirannya *thinking across* akan membudaya pada setiap pembuatan kebijakan yang adaptif.

Hal lain yang memiliki pengaruh mendasar dalam *dynamic governance* adalah budaya, yang meliputi prinsip, semangat tidak korup, orientasi pasar, pragmatis, multi-etnik dan kepercayaan, berorientasi jangka panjang, keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat, pertumbuhan (ekonomi), stabilitas, Kebijaksanaan dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa, serta kemandirian, yang semuanya mempengaruhi dan melahirkan tiga kemungkinan yaitu: menghambat (*constraints*), bertentangan (*confronts*), dan menghubungkan /penghubung (*catalyzes*). Dalam praktek pada banyak negara terdapat sebagian atau seluruh budaya megghambat, bertentangan atau penghubung (mendukung) proses *dynamic governance*.

Selanjutnya, kebijakan budaya nusantara juga mengajarkan hal serupa dalam *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across* yang dalam ajaran jawa, sebagai salah satu kultur dominan di Indonesia, mengenal adanya filosofi mulat sarira hangrasa wani dan bisaa rumangsa yang berarti berani bertindak dan mawas diri serta mampu memahami situasi serta dinamika yang terjadi. Kebijakan yang diputuskan untuk diadopsi sebagai hasil proses *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across* selanjutnya diimplementasikan sebagai semangat pemerintahan yang dinamis (*Dynamic governance*).

II.3. Tinjauan Umum Bank Sampah

Bank Sampah merupakan sebuah inisiatif berbasis masyarakat yang bertujuan untuk mengelola sampah secara lebih terstruktur dan efektif dengan cara memilah, mengumpulkan, dan mendaur ulang sampah yang dihasilkan. Program ini dirancang untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya, yaitu rumah tangga dan sektor lainnya. Dengan demikian, Bank Sampah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah, tetapi juga sebagai solusi untuk mengurangi beban yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta sebagai wadah edukasi bagi masyarakat untuk mengelola sampah dengan cara yang ramah lingkungan.

Namun, berdasarkan data yang ada, hanya sekitar 7,3% dari total

produksi sampah harian di Kota Makassar yang berhasil terpilah dan dikelola dengan baik melalui Bank Sampah. Sisanya, sebanyak 92,7% sampah tidak terkelola dengan efektif dan menjadi beban bagi TPA yang sudah overkapasitas. Kesenjangan ini menunjukkan pentingnya untuk memperkuat efektivitas program Bank Sampah dan memperluas jangkauan pengelolaan sampah yang berbasis pada partisipasi masyarakat.

Dynamic Governance adalah pendekatan yang menekankan pentingnya kolaborasi, adaptasi, dan pengelolaan sumber daya yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi. Dalam masalah persampahan, penerapan Dynamic Governance dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah. Hal ini dapat memperbaiki kelemahan yang ada, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis Bank Sampah.

Pendekatan ini menekankan setiap pemangku kepentingan untuk dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi dan tantangan yang ada. Misalnya, untuk meningkatkan jumlah sampah yang terpilah, perlu ada upaya untuk menyadarkan dan memberdayakan masyarakat agar mereka lebih aktif dalam program Bank Sampah. Dengan demikian, konsep *dynamic governance* dapat berperan penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan, sehingga mengurangi beban di TPA dan meminimalkan

dampak lingkungan dari sampah yang tidak terkelola.

1. Konsep Bank Sampah

Bank sampah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sehingga memiliki nilai ekonomis. Dengan kata lain, bank sampah adalah lembaga ekonomi dimana sampah menjadi alat tukar yang digunakan dalam kegiatannya. Karena tidak seperti bank pada umumnya yang menggunakan uang sebagai alat utamanya, bank sampah fokus pada pengelolaan sampah untuk menjadi solusi dari permasalahan sampah. Bank sampah menjadi solusi dan strategi dari pemerintah dalam mengurangi timbulan sampah lewat prinsip 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*).

Bank sampah didirikan karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah. Sampah yang semakin banyak tentu akan menimbulkan banyak masalah, sehingga memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna. Tujuan dari Bank Sampah adalah membantu menangani pengolahan sampah dan membiasakan warga untuk tidak membuang sampah, memaksimalkan pemilahan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan, membantu masyarakat memahami nilai barang bekas seperti sampah, dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang dan menjadi timbulan sampah.

Manfaat bank sampah adalah mengurangi jumlah sampah di lingkungan masyarakat agar tercipta lingkungan yang sehat, rapih dan bersih, sehingga masyarakat dapat tinggal dengan kondisi lingkungan yang bersih dan nyaman untuk ditinggali. Bank sampah juga memberi manfaat bagi masyarakat guna menambah penghasilan serta membuat masyarakat paham akan pentingnya menjaga dan menghargai lingkungan hidup.

Dalam implementasinya, bank sampah dapat mengurangi sebagian besar sampah masyarakat yang berakhir di TPA. Karena masyarakat memilah sampahnya, menukarkan sampahnya ke bank sampah, dan membuang sampah yang tidak masuk ke bank sampah. Ini akan membantu mengurangi jumlah sampah di masyarakat dan TPA. Itu artinya masyarakat bisa melakukan apa yang biasa disebut dengan reduce (pengurangan volume) (Pratiwi, 2018).

Konsep yang ditawarkan Bank Sampah ini sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, semua warga harus memisahkan sampah yang dihasilkan dari sumbernya. Sampah yang dianggap tidak berharga dan dibakar oleh warga atau dibuang ke tempat lain dipilah dan disimpan di bank sampah atau diinvestasikan (Rosmita, 2022).

2. Manajemen Bank Sampah

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah adalah

sebagai berikut :

- a. Pengurangan Sampah. Di Bank Sampah, dilakukan kegiatan pengurangan sampah dengan menggunakan kembali sampah. Pertimbangan utama dalam daur ulang sampah adalah penggunaan kembali seluruh atau sebagian sampah menurut fungsi yang sama atau berbeda tanpa melalui proses pengolahan. Daur ulang sampah adalah untuk sampah yang dapat digunakan kembali secara fungsional, seperti sampah plastik, kertas, logam, dan kaca.
- b. Penanganan sampah. Pengelola bank sampah perlu memahami kegiatan pembuangan sampahnya masing-masing agar dapat menentukan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan bank sampah yang dikelolanya. Selain itu, dengan memahami pentingnya setiap kegiatan pengolahan sampah, pengelola bank sampah dapat menghitung nilai ekonomi dari potensi sampah yang diolah. Kegiatan pembuangan sampah dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti pemilahan, pengumpulan dan/atau pengolahan.
- c. Pengolahan sampah. Pengolahan sampah adalah kegiatan yang mengubah sifat, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Kegiatan ini dilakukan untuk meminimalkan timbulan sampah yang terangkut ke tempat pengolahan sampah akhir, sehingga yang diangkut hanya sisa pengolahan sampah. Pengolahan sampah dapat dilakukan

dengan berbagai cara, seperti: pengomposan; daur ulang bahan; dan/atau daur ulang energi.

Tata Kelola Bank Sampah dibedakan berdasarkan jenis Bank Sampah, yakni Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit. Pada dasarnya tata Kelola Bank Sampah baik BSI dan BSU perlu memenuhi unsur:

- 1) Struktur kelembagaan;
- 2) Cakupan pelayanan;
- 3) Nasabah;
- 4) Standar operasi prosedural (SOP).

II.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan objek pada program Bank Sampah ataupun *dynamic governance* telah banyak tersedia dan mendapatkan perhatian dari beberapa peneliti secara global, maupun di Indonesia. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. “Implementation of Public Service Innovation in Dynamic Governance of Dukcapil Pekanbaru City” oleh (Sufi, 2023)

Penelitian ini membahas inovasi pelayanan publik dalam tata kelola dinamis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pekanbaru. Penelitian ini menganalisis bagaimana pendekatan tata kelola yang dinamis diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas layanan kependudukan. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini mengidentifikasi keberhasilan Dukcapil

dalam memanfaatkan teknologi digital dan strategi inovatif, seperti pelayanan berbasis aplikasi, untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor, adaptasi kebijakan, dan keterlibatan masyarakat memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan inovasi. Artikel ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan layanan publik yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

2. “Dynamic Governance in Forestry Policy at Kepulauan Meranti District” oleh (Zainal et al., 2021)

Jurnal ini mengeksplorasi penerapan tata kelola dinamis dalam kebijakan kehutanan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini menyoroti tantangan dalam pengelolaan sumber daya hutan, termasuk konflik kepentingan, keberlanjutan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Melalui pendekatan kualitatif, studi ini menemukan bahwa tata kelola dinamis yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan sektor swasta mampu menciptakan kebijakan yang adaptif dan berbasis partisipasi.

Penulis juga menekankan pentingnya integrasi pengetahuan lokal dan kebijakan berbasis data untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan. Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas

kelembagaan dan keterlibatan pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola kehutanan yang berkelanjutan.

3. “Multilevel dynamic governance in dealing with crisis: the case of handling corona virus disease 19 (COVID-19) in Lampung Province, Indonesia” oleh (Kurniawan et al., 2023).

Penelitian ini membahas penerapan tata kelola dinamis multilevel dalam menangani pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung. Penelitian ini menganalisis koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan komunitas lokal dalam merespons krisis kesehatan global. Dengan pendekatan studi kasus, penulis mengidentifikasi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, komunikasi antarlevel pemerintahan, serta penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang berubah-ubah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas kebijakan, adaptasi strategi berdasarkan kondisi lokal, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan tata kelola krisis. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme tata kelola yang responsif dan integratif untuk menghadapi krisis serupa di masa depan.

4. “Dynamic capabilities for firm performance under the information technology governance framework” oleh (Khalil & Belitski, 2020).

Artikel ini mengkaji bagaimana kapabilitas dinamis organisasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam kerangka tata kelola teknologi informasi (IT governance). Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara pengelolaan IT yang efektif dengan kemampuan

perusahaan untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar. Dengan menggunakan data empiris, studi ini menunjukkan bahwa integrasi strategi IT dengan tujuan bisnis, inovasi teknologi, dan pengambilan keputusan yang responsif memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Artikel ini memberikan wawasan bagi manajer dan pengambil kebijakan untuk mengoptimalkan investasi IT melalui tata kelola yang terstruktur dan adaptif.

5. “Relational governance mechanisms as enablers of dynamic capabilities in Nigerian SMEs during the COVID-19 crisis” oleh (Ashiru et al., 2022).

Penelitian ini membahas bagaimana mekanisme tata kelola relasional, seperti kepercayaan, komitmen, dan komunikasi, mendukung pengembangan kapabilitas dinamis pada UKM di Nigeria selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali bagaimana hubungan antar pemangku kepentingan membantu UKM beradaptasi, memanfaatkan sumber daya secara efisien, dan tetap kompetitif di tengah ketidakpastian ekonomi.

Temuan menunjukkan bahwa tata kelola relasional memainkan peran kunci dalam menciptakan ketahanan bisnis melalui inovasi dan fleksibilitas strategis. Artikel ini menawarkan wawasan praktis bagi

UKM untuk memperkuat kolaborasi sebagai strategi menghadapi krisis di masa depan.

6. “Down the drain: The dynamic interplay of governance adjustments addressing setbacks in large public–private projects” oleh (Fang et al., 2024).

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika penyesuaian tata kelola dalam menghadapi hambatan pada proyek besar berbasis kemitraan publik-swasta (*Public-Private Partnerships, PPPs*). Studi ini menganalisis bagaimana mekanisme tata kelola yang adaptif, seperti pembaruan kontrak, koordinasi lintas pemangku kepentingan, dan pengelolaan risiko, membantu mengatasi tantangan kompleks seperti keterlambatan, peningkatan biaya, dan konflik kepentingan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan menemukan bahwa penyesuaian tata kelola yang fleksibel dan proaktif menjadi kunci keberhasilan proyek-proyek besar tersebut. Artikel ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan pelaksana proyek dalam mengelola dinamika dan kompleksitas PPP secara efektif.

7. “Elemen Sukses Penerapan Dynamic Governance di Provinsi Jawa Barat” oleh (Martoyo & Sihaloho, 2021).

Artikel ini membahas faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan penerapan tata kelola dinamis di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana adaptasi kebijakan, inovasi layanan publik, dan keterlibatan pemangku kepentingan

memungkinkan pemerintahan daerah merespons tantangan secara fleksibel dan efektif.

Melalui studi kualitatif, penulis mengidentifikasi elemen utama seperti kepemimpinan visioner, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi sebagai pendorong keberhasilan tata kelola dinamis. Temuan ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kapasitas institusi dalam menghadapi perubahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.

8. “Dynamic changes of governance mechanisms in mega construction projects in China: The mediating role of opportunism” oleh (Wang et al., 2019).

Penelitian ini mengeksplorasi perubahan dinamis dalam mekanisme tata kelola pada proyek konstruksi berskala besar di China, dengan fokus pada peran mediasi oportunisme. Penelitian ini mengungkap bagaimana tata kelola formal (seperti kontrak) dan tata kelola relasional (seperti kepercayaan) mengalami penyesuaian untuk mengurangi risiko oportunisme di antara para pemangku kepentingan.

Studi ini menggunakan metode survei dan analisis data empiris untuk menunjukkan bahwa kombinasi mekanisme tata kelola yang adaptif dapat meminimalkan konflik, meningkatkan koordinasi, dan mendorong keberhasilan proyek. Artikel ini menawarkan wawasan

strategis untuk manajemen proyek besar yang kompleks dan melibatkan banyak pihak.

9. “Dynamic Governance in Countering Terrorism in Indonesia: A Discourse Network Analysis on Online News Media” oleh (Amin & Wahyunengseh, 2022).

Penelitian ini menganalisis peran tata kelola dinamis dalam penanggulangan terorisme di Indonesia melalui pendekatan analisis jaringan wacana pada media berita daring. Penelitian ini menggali bagaimana berbagai aktor, termasuk pemerintah, media, dan masyarakat sipil, membentuk dan mendiskusikan kebijakan kontra-terorisme di platform media digital.

Dengan menggunakan metode analisis jaringan wacana, studi ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dan peran media dalam membentuk opini publik sangat penting dalam merespons ancaman terorisme. Temuan ini menekankan pentingnya koordinasi dan transparansi antara pemangku kepentingan untuk mengatasi terorisme dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif.

10. “Membumikan *Dynamic Governance* Dalam Meningkatkan Profesionalisme Manajemen Penyelenggaraan Haji” oleh (Kusuma, 2017).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsih inisiatif pemikiran dalam meningkatkan profesionalisme manajemen

penyelenggaraan haji melalui dynamic governance. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian dengan memperhatikan pada budaya dan kapabilitas Kementerian Agama menunjukkan bahwa *thinking ahead* dapat dijalankan dengan menganalisis dan memproyeksikan apa yang akan dihadapi dalam 10 atau 20 tahun ke depan berdasarkan kecenderungan perubahan nasional dan global, konstelasi politik, dan sosio-ekonomi masyarakat. *Thinking again* dapat dilakukan dengan *me-review* kembali apakah kebijakan, strategi, dan program yang sedang berjalan sudah tepat dan mampu memenuhi kebutuhan jamaah haji. Dan *Thinking across* dapat diaplikasikan dengan belajar dari pengalaman negara lain yang juga mengatur penyelenggaraan ibadah haji. Kata Kunci: Dynamic Governance, Profesionalisme, Manajemen Haji

11. “Dynamic governance: A new era for consent for stem cell research” oleh (Isasi et al., 2024).

Penelitian ini membahas pendekatan baru dalam tata kelola dinamis terkait proses persetujuan (consent) dalam penelitian sel punca. Penulis menyoroti tantangan etika dan hukum yang muncul dari kemajuan pesat dalam penelitian sel punca, termasuk penggunaan data biologi dan jaringan manusia.

Artikel ini mengusulkan kerangka kerja tata kelola dinamis yang fleksibel dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menekankan keterlibatan yang berkelanjutan antara peneliti, peserta penelitian, dan pemangku kepentingan, memastikan persetujuan tetap relevan, transparan, dan etis di era ilmu pengetahuan yang terus berubah. Temuan ini memberikan panduan penting bagi para peneliti dan pembuat kebijakan untuk menjaga keseimbangan antara inovasi ilmiah dan kepentingan peserta penelitian.

12. “Waste Bank: Waste Management Model in Improving Local Economy” oleh (Wulandari et al., 2017).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan model pengelolaan sampah melalui bank sampah dan menjelaskan bagaimana rumah tangga meningkatkan kesejahteraannya melalui model ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan melalui wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan, rumah tangga, dan pengelola bank sampah (Wulandari et al., 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengelolaan bank sampah tidak hanya bermanfaat dalam menciptakan lingkungan yang bersih tetapi juga berdampak pada perekonomian masyarakat dengan meningkatkan pendapatan ibu-ibu rumah tangga di sekitar bank

sampah. Masyarakat mengharapkan lebih banyak dukungan dari pemerintah untuk memperbaiki mekanisme bank sampah dan model penetapan harga sampah yang lebih baik.

13. Fatmawati et al., (2019) – “Kinerja Pelayanan Bank Sampah Kota Makassar”

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja pelayanan BSP Kota Makassar dilihat dari indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan kinerja UPT Pusat Bank Sampah masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang seharusnya tereduksi.

Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya peran serta masyarakat pengelola Bank Sampah unit dan kurang tersosialisasinya eksistensi keberadaan bank sampah unit pada masyarakat (Fatmawati et al., 2019). Rekomendasi dari penelitian ini adalah Pusat Bank Sampah Kota Makassar perlu fokus pada aspek pendampingan terhadap pengelolaan Bank Sampah Unit dengan menerapkan Model Bank Sampah Unit Berbasis Kawasan.

14. Kamil et al., (2021) – “Dynamic governance Model within Integrated Waste Management in Malang City: Agile People and Process in Action”.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengelolaan sampah dengan pendekatan *dynamic governance*. Pendekatan kualitatif digunakan dan bertujuan untuk memberikan narasi yang lebih

bernuansa tentang bagaimana dan mengapa pengelolaan sampah perkotaan dilakukan, disamping fenomena sosial yang terlibat. Hasilnya adalah kerangka tata kelola yang dinamis dalam praktik pengelolaan sampah di Kota Malang, termasuk fasilitas persampahan, pengembangan metode *sanitary landfill*, dan kemitraan dengan organisasi internasional.

Meski fasilitas seperti bank sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih dibutuhkan, upaya penerapan prinsip *agile* dengan pendekatan *citizen-centric* dalam pembangunannya belum mendapat perhatian besar dari pemerintah kota. Sedangkan kelompok rumah tangga lebih banyak menghasilkan sampah karena kondisi kota saat ini (Kamil et al., 2021).

Tabel II. 1. Matriks Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian Terdahulu	Persamaan dengan rencana penelitian penulis	Perbedaan dengan rencana penelitian penulis
1.	Ashiru et al. (2022)	Menganalisis peran mekanisme tata kelola relasional dalam mendukung kapabilitas dinamis UKM di Nigeria selama pandemi COVID-19.	Penelitian ini juga membahas mekanisme tata kelola yang dinamis dan pengaruhnya terhadap keberhasilan pengelolaan.	Fokus pada UKM di Nigeria dan dampak pandemi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan bank sampah di Kota Makassar.
2.	Isasi et al. (2024)	Membahas tata kelola dinamis dalam konteks persetujuan etis pada penelitian sel punca.	Sama-sama mengkaji penerapan tata kelola dinamis	Penelitian ini berfokus pada etika dan persetujuan dalam penelitian ilmiah, sementara penelitian penulis lebih terfokus pada pengelolaan

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian Terdahulu	Persamaan dengan rencana penelitian penulis	Perbedaan dengan rencana penelitian penulis
				sampah di pemerintah daerah.
3.	Sufi (2023)	Menganalisis inovasi pelayanan publik dan tata kelola dinamis di Dukcapil Kota Pekanbaru.	Penelitian ini juga menyoroti inovasi dalam tata kelola dinamis di sektor publik.	Penelitian ini lebih fokus pada inovasi pelayanan publik dan administrasi kependudukan, sedangkan penelitian penulis fokus pada pengelolaan sampah.
4.	Zainal et al. (2021)	Menganalisis penerapan tata kelola dinamis dalam kebijakan kehutanan di Kepulauan Meranti.	Sama-sama mengkaji dinamika tata kelola dalam pengelolaan sumber daya publik, dengan pendekatan yang adaptif dan kolaboratif.	Penelitian ini berfokus pada kebijakan kehutanan, sementara penelitian penulis fokus pada pengelolaan bank sampah.
5.	Kurniawan et al. (2023)	Menganalisis tata kelola multilevel dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Provinsi Lampung.	Sama-sama mengkaji tata kelola dinamis dalam konteks kebijakan publik dan tantangan sosial.	Penelitian ini berfokus pada krisis kesehatan global dan koordinasi pemerintah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan sampah di kota.
6.	Khalil & Belitski (2020)	Mengkaji hubungan antara kapabilitas dinamis dan kinerja perusahaan dalam kerangka tata kelola teknologi informasi.	Sama-sama membahas kapabilitas dinamis yang mendukung keberhasilan dalam pengelolaan, namun dalam konteks yang berbeda.	Fokus pada perusahaan dan teknologi informasi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan bank sampah di sektor public.
7.	Fang et al. (2019)	Meneliti perubahan mekanisme tata kelola dalam proyek konstruksi besar dan peran oportunisme dalam keberhasilannya.	Sama-sama menganalisis dinamika tata kelola dalam konteks yang melibatkan banyak pihak.	Fokus pada proyek konstruksi besar, sementara penelitian penulis berfokus pada pengelolaan sampah dengan partisipasi masyarakat.
8.	Amin & Wahyuningseh (2022)	Menganalisis tata kelola dinamis dalam penanggulangan terorisme di Indonesia melalui media daring.	Sama-sama mengkaji penerapan tata kelola dinamis dalam konteks	Fokus pada penanggulangan terorisme dengan menggunakan media daring, sedangkan penelitian penulis lebih

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian Terdahulu	Persamaan dengan rencana penelitian penulis	Perbedaan dengan rencana penelitian penulis
			pengelolaan isu publik.	berfokus pada pengelolaan bank sampah di tingkat kota.
9.	Martoyo & Sihalohe (2021)	Menganalisis elemen-elemen yang mendukung keberhasilan penerapan tata kelola dinamis di Provinsi Jawa Barat.	Sama-sama mengkaji penerapan tata kelola dinamis dalam konteks pemerintahan daerah.	Fokus pada Pemerintah provinsi Jawa Barat, sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada pengelolaan bank sampah di Kota Makassar.
10.	Wang et al. (2019)	Menganalisis perubahan mekanisme tata kelola dalam proyek konstruksi besar di China dan peran oportunisme dalam keberhasilannya.	Sama-sama mengkaji perubahan tata kelola dinamis dalam konteks proyek besar.	Fokus pada proyek konstruksi di China dan peran oportunisme dalam keberhasilan proyek, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan bank sampah di sektor publik.
12.	Fatmawati et al., (2019)	Tujuan dari tulisan ini adalah untuk bertujuan untuk mengkaji kinerja pelayanan BSP Kota Makassar	Sama-sama meneliti program Bank Sampah	Fokus penelitiannya adalah pada kinerja bank sampah, sedangkan penelitian ini pada tata Kapabilitas dinamis dalam tata Kelola bank sampah
13.	Salsabila (2023)	Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui collaborative governance pada bank sampah di Kota Makassar.	Sama-sama meneliti tata kelola pada program Bank Sampah Kota Makassar	Penelitian ini menganalisis collaborative governance, tapi sedangkan rencana penelitian pada dynamic governance
14.	Kamil et al., (2021)	Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengelolaan sampah dengan pendekatan dynamic governance	Sama-sama meneliti Dynamic governance pada pengelolaan sampah.	Rencana penelitian ini menganalisis kapabilitas dinamis dalam tata Kelola bank sampah, sedangkan penelitian terdahulu pada aspek agile people dan agile process.

Sumber: olah data peneliti (2024)

Tabel diatas memperlihatkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam fokus pada penerapan tata kelola dinamis, setiap penelitian memiliki konteks, subjek, dan tujuan yang berbeda. Rencana penelitian penulis lebih berfokus pada pengelolaan bank sampah di Pemerintah Kota Makassar, sedangkan penelitian terdahulu lebih berkaitan dengan sektor dan isu yang berbeda.

II.5. Kerangka Pikir

Penelitian ini berfokus pada bagaimana *Dynamic governance* dalam pengelolaan Bank Sampah di Kota Makassar. Analisis terhadap kapabilitas dinamis dalam tata Kelola yang telah dijelaskan oleh (Neo dan Chen, 2007) menguraikan elemen utama dari *dynamic governance*, yaitu budaya organisasi pemerintah dan kemampuan dinamis, menurutnya diperlukan semangat/ dinamika untuk selalu menyesuaikan kebijakan, strategi, dan program dengan perkembangan masa depan melalui budaya dan kapabilitas *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*.

Dalam konteks penelitian ini, ketiga elemen konsep Dynamic Governance yaitu budaya organisasi, kapabilitas dinamis, dan perubahan saling berinteraksi dan mempengaruhi secara signifikan dalam menciptakan sistem tata kelola yang efektif dan berkelanjutan. Budaya organisasi menjadi landasan yang sangat penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi antara pemerintah, pengelola Bank Sampah, serta masyarakat itu sendiri. Budaya yang inklusif, transparan, dan partisipatif menciptakan

ruang bagi semua pihak untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas program Bank Sampah. Ketika budaya organisasi mendukung kolaborasi, keterlibatan masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang sampah akan lebih tinggi, sehingga memperkuat pengelolaan sampah yang lebih efektif di tingkat lokal.

Kapabilitas dinamis berperan sebagai kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi, baik itu berupa perubahan jumlah sampah, kebijakan pemerintah, atau pola perilaku masyarakat. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Makassar, kapabilitas ini sangat krusial untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang, seperti lonjakan volume sampah pada periode tertentu atau penerapan teknologi baru dalam proses pengelolaan.

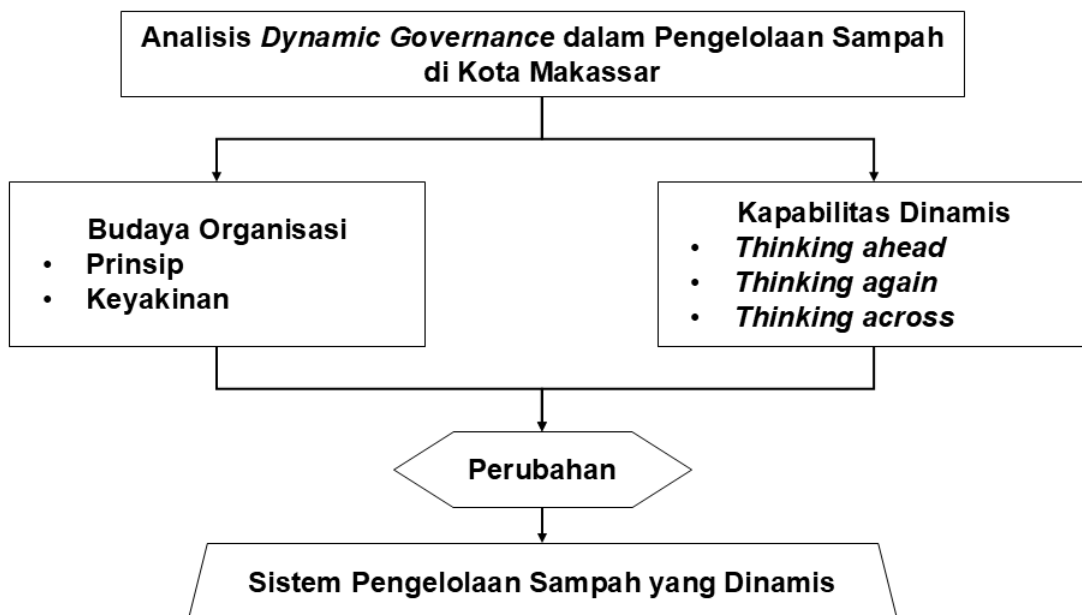
Kapabilitas dinamis yang baik memungkinkan pengelola Bank Sampah untuk menyesuaikan strategi dan operasionalnya sesuai dengan situasi yang ada, sehingga program pengelolaan sampah tetap relevan dan efektif. Tanpa kapabilitas dinamis, suatu organisasi akan kesulitan merespons perubahan yang terjadi, baik dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah atau perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah.

Perubahan, sebagai elemen ketiga, tidak hanya merujuk pada perubahan kebijakan atau strategi, tetapi juga mencakup perubahan yang lebih luas, baik dalam pola perilaku masyarakat maupun dalam cara organisasi

menghadapi tantangan baru. Perubahan dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar, misalnya, dapat berupa kebijakan baru yang lebih ramah lingkungan atau pendekatan yang lebih inovatif dalam memilah sampah.

Proses perubahan ini tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh budaya organisasi yang adaptif dan kapabilitas dinamis yang memadai. Dalam hal ini, budaya organisasi yang terbuka terhadap inovasi dan perubahan, bersama dengan kapabilitas dinamis dalam menanggapi perubahan tersebut, memungkinkan pengelolaan sampah untuk berkembang dan beradaptasi dengan baik

Adapun bagan kerangka pikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar II. 2. Bagan Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: adaptasi penulis dari Neo dan Chen (2007:13)